

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

Ratika Algamar^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}ratikaalgamar00@gmail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

15-08-2024

Diterbitkan Online:

01-12-2024

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan Subsidi Listrik, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang

Keywords:

Implementation, Electricity Subsidy Policy, Lubuk Begalung District, Padang City

Corresponding Author:

ratikaalgamar00@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 diatur mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga khususnya golongan R1-450 VA dan R1-900 VA, yang mencakup sekitar 85 persen dari total pelanggan. Kota Padang menjadi urutan pertama angka tertinggi pada jumlah penduduk miskin berdasarkan data badan pusat statistik Provinsi Sumatera Barat, salah satunya kecamatan Lubuk Begalung. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam hal kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi listrik di kecamatan lubuk begalung tepat sasaran dan dampak yang dirasakan oleh warga golongan rumah tangga tidak mampu terkait adanya kebijakan subsidi listrik ini. Menurut Dunn, implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik, teori implementasi menurut Dunn mencakup Kompleksitas implementasi, interaksi aktor, konteks lokal, kapasitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Untuk menentukan informan peneliti lakukan dengan teknik purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 15 orang, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, observasi selanjutnya analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data Hasil Penelitian menunjukkan terkait implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga tidak mampu Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang masih ada rumah tangga yang tidak mampu belum mendapatkan subsidi listrik, sementara itu rumah tangga yang diduga mampu menjadi penerima subsidi listrik. Kemudian proses administrasi pendaftaran yang memakan waktu lama serta adanya penyalahgunaan tujuan dari kebijakan subsidi listrik ini di Kecamatan Lubuk Begalung.

ABSTRACT

Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 29 of 2016, the mechanism for providing electricity tariff subsidies for households is regulated. In this case, the government has allocated a budget for electricity subsidies to customers, most of whom fall into the R1-450 VA and R1-900 VA categories, which account for about 85 percent of the total customers. The state has the obligation to subsidize electricity consumption for underprivileged communities. This study aims to examine the implementation of the electricity subsidy policy in Lubuk Begalung Subdistrict, focusing on whether it is effectively targeted, and the impact felt by low-income households regarding this subsidy policy. According to Dunn, policy implementation is a crucial stage in the public policy cycle. Dunn's implementation theory includes the complexity of implementation, actor interaction, local context, and implementation capacity. This study uses a qualitative approach. The results indicate that in the implementation of the targeted electricity subsidy policy for low-income households in Lubuk Begalung Subdistrict, Padang City, there are still low-income households that have not received electricity subsidies, while households suspected of being financially capable are receiving them. Additionally, the lengthy administrative registration process and the misuse of the intended purpose of the electricity subsidy policy were identified as issues.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.227>

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi listrik melalui PT. PLN untuk masyarakat membuktikan bahwa pemerintah berperan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Subsidi listrik bisa diartikan sebagai bentuk bantuan dari pemerintah agar masyarakat bisa membayar tarif listrik lebih murah dari tarif yang sudah ditetapkan. Pemberian subsidi listrik merupakan peraturan menteri ESDM No.28 Tahun 2016 mengatur tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Peraturan Menteri ESDM No.29 Tahun 2016 mengatur mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga. Dalam hal ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi listrik untuk pelanggan yang sebagian besar adalah golongan R1-450 VA dan R1-900 VA, yang mencakup sekitar 85 persen dari total pelanggan.

Di Provinsi Sumatera Barat, kebijakan subsidi listrik ini telah diterapkan, akan tetapi masih belum diterapkan dengan baik. Berdasarkan data dari Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, terdapat 335.210 penduduk miskin di provinsi tersebut. Dari 19 Kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Kota Padang merupakan kota dengan angka kemiskinan tertinggi sebanyak 42,37 ribu jiwa di Kota Padang. Dengan banyaknya jumlah penduduk kurang mampu di daerah ini tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi seperti inilah pemerintah berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan subsidi listrik tepat sasaran terhadap rumah tangga tidak mampu.

Tabel 1. Jumlah Penerima Subsidi Listrik di Kota Padang

| No | Wilayah | Jumlah Penerima Subsidi Listrik Daya 450 | Jumlah Penerima Subsidi Listrik Daya 900 |
|----|----------|--|--|
| 1 | Nanggalo | 117 | 294 |

| No | Wilayah | Jumlah Penerima Subsidi Listrik Daya 450 | Jumlah Penerima Subsidi Listrik Daya 900 |
|----|---------------------|--|--|
| 2 | Bungus Teluk Kabung | 97 | 151 |
| 3 | Lubuk Kilangan | 195 | 228 |
| 4 | Padang Utara | 106 | 217 |
| 5 | Pauh | 154 | 182 |
| 6 | Kuranji | 171 | 305 |
| 7 | Padang Barat | 122 | 237 |
| 8 | Padang Timur | 143 | 281 |
| 9 | Padang Selatan | 114 | 312 |
| 10 | Koto Tangah | 197 | 296 |
| 11 | Lubuk Begalung | 233 | 249 |

Sumber Dinas Sosial Kota Padang, 2022

Berdasarkan data yang tersedia mengenai jumlah penerima subsidi listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA di berbagai wilayah Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa distribusi penerima subsidi listrik cukup beragam antar wilayah.

Secara umum, jumlah penerima subsidi listrik dengan daya 900 VA lebih tinggi dibandingkan dengan daya 450 VA di hampir semua wilayah. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kebutuhan daya listrik pada setiap rumah tangga, di mana sebagian besar rumah tangga yang berpenghasilan rendah lebih banyak menggunakan daya 900 VA untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari.

Wilayah dengan jumlah penerima subsidi daya 450 VA terbanyak adalah Lubuk Begalung, dengan total 233 penerima. Wilayah ini memiliki jumlah penerima subsidi daya 450 VA yang cukup signifikan, diikuti oleh wilayah Koto Tangah (197 penerima) dan Lubuk Kilangan (195 penerima). Sementara itu, Bungus Teluk Kabung mencatatkan jumlah penerima subsidi daya 450 VA terendah, dengan hanya 97 orang yang tercatat.

Kecamatan Lubuk Begalung merupakan kecamatan dengan angka penerima subsidi listrik terbanyak kedua setelah kecamatan Nanggalo, sebanyak 482 rumah tangga tidak mampu yang menjadi penerima subsidi listrik.

Permasalahan yang peneliti temukan di lapangan yaitu pertama, masih ada golongan rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan subsidi listrik, kedua ditemukan adanya rumah tangga mampu yang ikut serta menikmati subsidi listrik, hal ini diketahui dengan adanya rumah tangga mampu yang tergabung dalam satu rumah dengan rumah tangga tidak mampu, ketiga proses administrasi yang masih sulit serta memakan waktu yang lama, keempat adanya penyalahgunaan dari tujuan kebijakan subsidi listrik ini.

Fokus penelitian ini yaitu Implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga tidak mampu di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu administrasi negara, khususnya pada kajian kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan subsidi listrik ini di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Untuk menjelaskan bagaimana Implementasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga tidak mampu di kecamatan lubuk begalung kota padang merupakan tujuan dari penelitian ini.

Implementasi kebijakan menurut para ahli adalah proses penerapan kebijakan publik ke dalam tindakan nyata di lapangan. Para ahli berpendapat bahwa implementasi kebijakan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, hingga evaluasi. Implementasi kebijakan juga melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam rangka mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Wahab (dalam

Cristianingsih, 2020), implementasi dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Biasanya, implementasi dilakukan dalam bentuk undang-undang, Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan sebelumnya. Tujuan dari implementasi kebijakan adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses menerapkan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan dan ditetapkan secara terstruktur. Implementasi ini dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi merupakan tahap di mana persiapan yang telah diatur sebelumnya diwujudkan menjadi tindakan nyata. Jika implementasi dilakukan dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Namun, jika implementasi tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak negatif atau buruk terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peraturan terkait mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima subsidi, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 29 tahun 2016. Dalam peraturan ini, terdapat banyak tugas yang ditanggungjawabkan kepada pemerintah, dengan pemerintah daerah sebagai agen utama dalam pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran. Pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan subsidi ini meliputi kecamatan, kelurahan, serta PT PLN Persero sebagai penyedia listrik negara.

Kebijakan ini bertujuan untuk Tujuan untuk meringankan beban biaya listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan aksesibilitas energi listrik, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menekan biaya produksi, serta mendorong penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kecamatan Lubuk Begalung termasuk masyarakatnya paling banyak penerima subsidi listrik setelah kecamatan Nanggalo di Kota Padang. Kecamatan Lubuk Begalung terletak di Kota Padang yang merupakan wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Lubuk Begalung merupakan bagian

dari 11 Kecamatan di Kota Padang. Kecamatan Lubuk Begalung memiliki jumlah penduduk sebanyak 122,925 jiwa, yang terdiri dari 61,597 laki-laki dan 61,328 perempuan.

Rata-rata mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Lubuk Begalung umumnya melibatkan sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan usaha kecil menengah. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pedagang, pengusaha kecil, buruh, petani, serta karyawan di sektor swasta dan pemerintahan.

Mengenai pembahasan hasil penelitian ini akan dijelaskan sesuai dengan rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diukur menggunakan teori implementasi kompleksitas implementasi, interaksi aktor, konteks lokal dan kapasitas implementasi kebijakan menurut Dunn. Dunn menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam implementasi kebijakan. Setiap wilayah atau masyarakat memiliki karakteristik unik yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan harus disesuaikan dengan konteks lokal agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

METODE PENELITIAN

Penulis mengambil pendekatan kualitatif untuk penelitian ini, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013: 3) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau peristiwa yang sudah disebutkan, kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu pemrnjnilaian yang memberikan informasi deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menginterpretasikan dan menjelaskan wawancara, observasi, Dokumentasi untuk mendapatkan jawaban rinci atas masalah dan dalam urutan. Sugiyono (2010) dalam pengertian informan penelitian adalah narasumber yang mengarah kepada seseorang yang mengerti dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjelasan tentang topik penelitian yang diangkat. Informan penelitian (sumber) adalah orang menguasai Informasi tentang topik yang akan

diteliti oleh peneliti. Para informan penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Di dalam Penelitian ini mengidentifikasi informan dengan menggunakan teknik yang ditargetkan, yaitu dipilih menurut kriteria dan tujuan tertentu yang benar-benar berlaku objek yang dipelajari oleh para ilmuwan. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu. Aspek-aspek tertentu, misalnya seseorang Siapa yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai pengatur yang memudahkan peneliti untuk mempelajari objek/situasi sosial diperiksa (Sugiyono, 2012:54). Dalam penelitian ini, informan yang dipilih berjumlah 2 orang dari Dinas sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 2 orang dari PT. PLN sebagai pelaksana pendataan lapangan berdasarkan data yang diberikan oleh dinas social, 3 orang dari Pekerja Sosial Masyarakat, 8 orang Masyarakat penerima bantuan subsidi.

Penulis juga mengumpulkan data dokumentasi digunakan dengan mempelajari jurnal atau materi terkait implementasi kebijak. Jenis data yang di kumpulkan adalah data primer dan data skunder. Uji keabsahan data penulis menggunakan Teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang di peroleh dari informan atau sumber lainnya. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, yang berarti fakta-fakta yang dikumpulkan dan dideskripsikan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik pengumpulan data, reduksi data, peyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Saran Kecamatan Lubuk Begalung

Diukur menggunakan teori implementasi yaitu kompleksitas implementasi, interaksi aktif, konteks lokal, kapasitas implementasi oleh Dunn.

a) Kompleksitas

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan Koordinasi yang efektif dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, merupakan elemen krusial. Kebijakan subsidi listrik tidak hanya terkait dengan aspek teknis dan finansial, tetapi juga perlu disesuaikan dengan kondisi

sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu, kerjasama erat dengan pemerintah daerah diperlukan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. PLN juga menyoroti tantangan dalam mengelola kompleksitas kebijakan subsidi tersebut, termasuk adanya fluktuasi kebutuhan listrik, perubahan regulasi, dan tuntutan untuk efisiensi operasional. Pemantauan terus-menerus terhadap perubahan kondisi eksternal dan adaptasi cepat terhadap dinamika pasar menjadi hal penting dalam menjaga kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Perubahan regulasi yang dimaksud disini adalah Pemerintah melakukan peninjauan kembali kriteria penerima subsidi listrik dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, jumlah tanggungan, dan aspek lainnya seperti yang termuat dalam dinamika perubahan kebijakan subsidi listrik di Indonesia.

b) Interaksi Aktor

Berdasarkan temuan di lapangan Pihak pemerintah melalui Dinas sosial dalam kebijakan subsidi ini bekerja sama dengan pihak PLN untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa calon pelanggan yang akan mengajukan permohonan kepada PLN untuk dapat menerima subsidi listrik merupakan golongan rumah tangga tidak mampu, lalu surat keterangan yang telah diterima ini menjadi surat pengantar untuk memenuhi persyaratan ke PLN. Interaksi antara Dinas sosial dan PT. PLN berperan penting terkait implementasi kebijakan subsidi listrik, termasuk pembaruan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi. Kerjasama ini memungkinkan untuk saling berbagi informasi secara efektif dan memastikan distribusi subsidi berjalan lancar. PLN bekerja sama dengan Dinas Sosial terkait penyesuaian data pelanggan calon penerima subsidi listrik, Pelanggan yang bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan subsidi listrik yaitu memastikan terlebih dahulu bahwa sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), setelah itu PLN melakukan pengecekan data dengan memasukan NIK pelanggan, Jika benar pelanggan tersebut merupakan golongan rumah tangga tidak mampu, maka proses bisa dilanjutkan, akan tetapi jika tidak terdaftar, maka pelangga tersebut tidak bisa mengajukan permohonan. Interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam kebijakan subsidi listrik merupakan salah satu bentuk

untuk meningkatkan keberhasilan dalam penerapan, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong inovasi. Kesenambungan interaksi ini bertujuan untuk kebijakan yang efektif, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik terkait pelaksanaan kebijakan subsidi listrik memiliki dampak positif, karena umpan balik tersebut tidak hanya memungkinkan pemerintah atau lembaga terkait untuk memantau efektivitas kebijakan, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat, memberdayakan mereka dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong perbaikan berkelanjutan agar kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga dapat meningkatkan legitimasi kebijakan tersebut di mata publik.

c) Konteks Lokal

Dalam pelaksanaan kebijakan, kita menyadari bahwa keberhasilan kebijakan terletak pada kemampuannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi setempat. Kesadaran akan perbedaan ini memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika di setiap wilayah atau masyarakat. Dengan demikian, kesesuaian kebijakan dengan konteks lokal tidak hanya menjadi prinsip dalam merancang kebijakan yang efektif, tetapi juga menjadi kunci utama untuk mencapai keberlanjutan dan penerimaan yang luas dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Berdasarkan temuan yang peneliti temukan infrastruktur listrik pernah menghadapi sejumlah kesulitan. Terdapat tantangan berupa pemadaman listrik yang terjadi secara berkala dan ketidakstabilan pasokan energi, yang berdampak pada aksesibilitas listrik di beberapa wilayah. Infrastruktur distribusi listrik juga mengalami kekurangan daya dan memerlukan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan populasi. Sejauh ini, kebijakan subsidi listrik memiliki peran krusial dalam usaha meningkatkan ketersediaan listrik di wilayah ini. Dana yang diperuntukkan dari kebijakan tersebut telah diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur listrik. Tindakan-tindakan ini mencakup pembangunan pembangkit listrik baru, peningkatan kapasitas jaringan distribusi, dan penguatan daya tahan

infrastruktur terhadap gangguan. Dampak dari kebijakan subsidi listrik sudah dapat diamati. Ketersediaan listrik meningkat, insiden pemadaman berkurang, dan reliabilitas pasokan energi semakin membaik. Warga setempat melaporkan peningkatan aksesibilitas listrik, terutama di sektor rumah tangga dan usaha kecil menengah, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta menjadi kunci dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan subsidi listrik. Melibatkan pengetahuan dan sumber daya sektor swasta, hal ini mendukung rencana perbaikan infrastruktur listrik, memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas listrik, dan mendorong pembangunan dalam konteks lokal. konteks lokal dalam kebijakan subsidi listrik menjadi kunci keberhasilan implementasinya. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dapat memastikan dukungan dan penerimaan yang luas, menciptakan kebijakan yang lebih relevan, serta meningkatkan kesejahteraan dan inklusivitas. Dengan memahami perbedaan dan kebutuhan setiap wilayah, pemerintah dapat merancang solusi yang efektif, menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi lokal, dan memastikan kebijakan subsidi listrik berjalan sesuai dengan dinamika setempat.

d) Kapasitas Implementasi

Kapasitas implementasi kebijakan merupakan kemampuan berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Dalam konteks kebijakan subsidi listrik, hal ini mencakup kemampuan untuk memproses data penerima subsidi, mendistribusikan listrik dengan efisien, dan mengelola anggaran dengan baik. Kapasitas implementasi kebijakan subsidi listrik melibatkan serangkaian faktor yang menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan memberikan dampak positif. Evi Susanti selaku staff Dinas Sosial Menyatakan bahwa ketidakakuratan data adalah masalah utama.

“Staf yang terbatas mempengaruhi kecepatan pemrosesan data, sementara data yang tidak akurat menyebabkan masalah dalam penyaluran subsidi.” Berdasarkan temuan yang peneliti temukan Koordinasi yang kurang efektif dengan dinas sosial dengan adanya masalah dalam komunikasi dan pertukaran data

antara PT PLN dan dinas sosial. Ketidakcocokan data antara kedua instansi ini menyebabkan kebingungan dalam proses verifikasi dan penyaluran subsidi. Misalnya, jika data penerima subsidi yang diberikan oleh dinas sosial tidak sesuai dengan data yang dimiliki PT PLN, ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyaluran subsidi atau bahkan kegagalan dalam menerapkan subsidi dengan benar. Koordinasi yang buruk mengarah pada komplikasi dalam pelaksanaan kebijakan, seperti penundaan atau ketidakakuratan dalam penyaluran listrik subsidi. Penerima subsidi mengeluhkan beberapa masalah dalam mendapatkan bantuan listrik. Mereka merasa proses pendaftaran terlalu rumit dan membingungkan, dengan banyak langkah yang harus dilakukan dan dokumen yang perlu disiapkan. Selain itu, mereka tidak yakin tentang berapa banyak subsidi yang akan mereka terima, yang menambah kebingungan dan kekhawatiran. Mereka juga mengalami keterlambatan dalam menerima konfirmasi pendaftaran, yang membuat mereka tidak tahu segera apakah mereka sudah berhasil mendapatkan subsidi atau tidak. Proses pendaftaran subsidi listrik sangat rumit dan membingungkan. Saya harus mengisi banyak formulir dan mengumpulkan berbagai dokumen yang sangat detail, dan itu sangat menyulitkan karena saya tidak begitu paham tentang prosedur administrasi. terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan subsidi listrik. Perwakilan PT PLN mencatat bahwa infrastruktur yang tidak memadai dan koordinasi yang buruk dengan layanan sosial menghambat distribusi listrik dan membuat implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks. Sementara itu, penerima subsidi menghadapi tantangan seperti proses pendaftaran yang rumit, dan keterlambatan penerimaan konfirmasi pendaftaran. Semua masalah ini menambah ketidaknyamanan dan stres bagi penerima subsidi. Meningkatkan efektivitas kebijakan memerlukan perbaikan infrastruktur, koordinasi yang lebih baik antara layanan sosial dan PT PLN, penyederhanaan proses pendaftaran, dan komunikasi yang lebih jelas dengan penerima subsidi.

Dampak Kebijakan Subsidi Listrik

a) Tujuan Kebijakan Subsidi

Subsidi listrik dapat digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu tetap bisa mengakses listrik. Dalam

banyak negara berkembang, subsidi ini membantu mengurangi kesenjangan dalam akses listrik antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara berbagai kelompok sosial ekonomi. Listrik adalah kebutuhan esensial dalam kehidupan modern sehari-hari. Subsidi listrik bertujuan untuk mengurangi beban finansial bagi masyarakat dengan memastikan harga listrik tetap terjangkau, khususnya bagi rumah tangga tidak mampu. Berdasarkan temuan yang peneliti temukan Kebijakan ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya subsidi, biaya listrik yang harus mereka bayar menjadi lebih terjangkau.

PLN juga berusaha mendukung pembangunan infrastruktur listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga lebih banyak rumah tangga yang bisa menikmati manfaat listrik. Kebijakan subsidi listrik sangat penting untuk mendukung masyarakat miskin. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti proses pendaftaran yang rumit dan ketidakcocokan data penerima. Saya percaya bahwa dengan perbaikan dan koordinasi yang lebih baik, kebijakan ini bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Kebijakan subsidi listrik memiliki tujuan utama untuk menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun kebijakan ini sangat membantu, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti proses pendaftaran yang rumit dan masalah infrastruktur serta masih adanya golongan rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan subsidi listrik. Dukungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah, PT PLN, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan ini secara efektif.

b) Kelompok Sasaran

Kelompok yang menjadi sasaran subsidi listrik umumnya dipilih berdasarkan kriteria seperti tingkat pendapatan, konsumsi energi, dan faktor sosial-ekonomi lainnya. Contohnya meliputi rumah tangga dengan pendapatan rendah yang membutuhkan bantuan finansial untuk biaya listrik, juga rumah tangga yang menghadapi tantangan akses listrik. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa subsidi tersebut efektif mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan oleh pemerintah dan ahli kebijakan. Untuk menentukan kelompok

sasaran PLN melakukan verifikasi dengan menggunakan informasi dari pemerintah, seperti data Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari instansi terkait, untuk mengenali pelanggan yang memenuhi syarat sebagai penerima subsidi listrik. Data ini memberikan informasi yang akurat mengenai situasi ekonomi mereka. PLN melakukan verifikasi rutin terhadap pelanggan untuk memastikan bahwa bantuan ini disalurkan kepada yang tepat. Verifikasi ini melibatkan pengecekan ulang terhadap data pelanggan untuk memverifikasi kecocokan kriteria sebagai penerima subsidi. Selain itu, PLN berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa data yang digunakan selalu terbaru dan akurat, dan sejauh ini kita tantangan udalam memverifikasi bahwa semua pelanggan yang memenuhi syarat benar-benar terdaftar sebagai penerima subsidi. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi agar bantuan dapat disalurkan tepat waktu dan dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan kebijakan ini sangat membantu, terutama bagi kami yang berpenghasilan rendah. Namun, ada beberapa tetangga saya yang sepertinya juga membutuhkan bantuan tetapi belum terdaftar. Saya berharap pemerintah bisa lebih teliti dalam mendata penerima subsidi sehingga semua yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan. Secara umum, kelompok sasaran kebijakan subsidi listrik sudah tepat, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, masih ada beberapa masalah dalam proses pendataan dan verifikasi. Beberapa orang yang sebenarnya membutuhkan masih belum terdaftar, sementara ada juga yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan tetapi terdaftar. Penting untuk terus memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi agar subsidi ini bisa benar-benar tepat sasaran. bahwa kebijakan subsidi listrik ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, terutama rumah tangga tidak mampu. Proses penentuan dan pengelolaan kelompok sasaran dilakukan melalui kerja sama antara dinas sosial dan PT PLN untuk memastikan bahwa subsidi diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Meski begitu, masih terdapat tantangan dalam pendataan dan verifikasi yang perlu diatasi agar subsidi listrik ini benar-benar tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

c) Manfaat Subsidi Listrik

Berdasarkan temuan yang peneliti temui Subsidi listrik dapat membantu mengurangi beban biaya bulanan rumah tangga tidak mampu, Program ini bermanfaat dalam menjamin akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap energi listrik untuk semua orang, yang mendukung kehidupan sehari-hari dan produktivitas. Dengan biaya listrik yang lebih terkontrol, keluarga dapat mengelola anggaran mereka lebih efektif, meningkatkan stabilitas keuangan, dan mengurangi risiko kemiskinan. Subsidi ini juga mendukung daya beli di komunitas lokal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan dasar di seluruh negeri, termasuk di daerah-daerah dengan akses ekonomi yang terbatas Subsidi listrik memberikan manfaat utama bagi kami dengan mempermudah pengelolaan anggaran bulanan. Sebagai keluarga dengan pendapatan yang terbatas, subsidi ini membantu mengurangi beban biaya hidup kami, terutama dalam hal tagihan listrik bulanan. subsidi listrik memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga tidak mampu. Kebijakan ini membantu mengurangi beban biaya hidup sehari-hari dengan memungkinkan penggunaan listrik yang lebih terjangkau tanpa perlu khawatir akan biaya yang tinggi. Subsidi ini juga memberikan keamanan finansial dan membantu dalam manajemen anggaran keluarga yang lebih efektif.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan subsidi listrik sangat membantu, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam pendataan dan verifikasi penerima subsidi. Beberapa individu yang membutuhkan bantuan belum terdaftar, sementara ada juga yang terdaftar meskipun tidak terlalu membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kelompok sasaran kebijakan subsidi ini sudah tepat, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, proses pendataan dan verifikasi perlu ditingkatkan.

Kebijakan subsidi listrik ini ditujukan untuk rumah tangga tidak mampu dan pengelolaannya melibatkan kerja sama antara dinas sosial dan PT PLN. Meskipun demikian, tantangan dalam proses pendataan dan verifikasi perlu diperbaiki

agar subsidi dapat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem pendataan dan verifikasi agar subsidi ini lebih efektif dan tepat sasaran.

Saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Perbaiki data dan verifikasi dengan cara rutin perbarui data penerima subsidi dan perketat proses verifikasi untuk memastikan subsidi tepat sasaran; Penyederhanaan pendaftaran dengan cara buat pendaftaran lebih mudah diakses dan gunakan teknologi untuk mempermudah pendaftaran; Sosialisasi dan informasi dengan cara informasikan mekanisme dan manfaat subsidi secara efektif dan Perlu diperbaiki koordinasi antara pemerintah, pt pln, dan masyarakat. Pengawasan harus diperketat untuk mencegah masalah. Selain itu, sanksi tegas harus diterapkan untuk mengatasi penyalahgunaan, dan audit rutin diperlukan untuk memastikan subsidi diberikan dengan tepat. Langkah-langkah ini akan membuat kebijakan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinny, A. E., (2020). Model Kesesuaian kebijakan subsidi listrik. *Jurnal Ilmiah Indonesia. Volume 5 No 1*, 54 -58.
- Desrinelti., Maghfirah A., & Nurhizrah G., (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia. Volume 6 No 1*, 85-90.
- Abdussamad, Z.(2021). Metode Penelitian Kualitatif. 1st Ed. Edited By P. Rapanna. Makassar: Syakir Media Press.
- Alfania Y., Amanda K., & Augustin R. H., Kismartini. (2022) Analisis Kepuasan Masyarakat Jenangan Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Di Masa Pandemi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 5 (1) 39-45.
- Ruddy, G., Panjaitan. R., Sutedje., Priamb., Fajar A, W., Adi C., Endro K., (2021). Transformasi Subsidi Listrik Indonesia. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21 (1), pp.84-92.
- Awan Y., Abdoellah, Yudi R., (2016) *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Dian S, K., D, (2021) *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, Evaluasi*. Yogyakarta. Samudra Biru.
- Chazali H., Situmorang., (2016) *Buku Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Social Security Development Institute (SSDI).
- Lexy J. Moleong, (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riant N., (2009) *Public Policy : teori kebijakan, "analisis kebijakan, proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi, risk management dalam kebijakan publik, kebijakan sebagai the fifth estate, metode penelitian"*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sri S., (2013) *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Pramono, D.A., & Haryanto, T. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Data Susenas 2019*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*
- Joko P., (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: UNISRI Pres.
- Dinny A, E., (2020). Model Kesesuaian kebijakan subsidi listrik. *Jurnal Ilmiah Indonesia. Volume 5 No 1*, 54 -58.
- Desrinelti., Maghfirah A., & Nurhizrah G., (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia. Volume 6 No 1*, 85-90.
- Abdussamad, Z.(2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st Ed. Edited By P. Rapanna. Makassar: Syakir Media Press.
- Alfania Y., Amanda K., & Augustin R. H., Kismartini. (2022) Analisis Kepuasan Masyarakat Jenangan Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Di Masa Pandemi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 5 (1) 39-45.
- Ruddy, G., Panjaitan. R., Sutedje., Priamb., Fajar A, W., Adi C., Endro K., (2021). Transformasi Subsidi Listrik Indonesia. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21 (1), pp.84-92.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016.